



PROYEK PRUBAHAN

MEMBANGUN KERJASAMA ORGANISASI MASYARAKAT ADAT UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK SOSIAL

DI BALI

DIBUAT OLEH

Drs. I NYOMAN GEDE SUARIANTA

NDH : 2023070712057

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Keamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) adalah pondasi yang esensial bagi kemajuan dan stabilitas suatu masyarakat. Pada dasarnya, Kamtibmas mencerminkan kondisi di mana masyarakat dapat hidup dengan damai, beraktivitas tanpa rasa cemas, dan mengembangkan potensi secara optimal. Dalam lingkup yang lebih luas, Kamtibmas melibatkan berbagai elemen, termasuk lembaga penegak hukum dan intelijen, yang bekerja bersama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dalam era dinamika global dan perubahan sosial yang terus berlangsung, peran pelayanan intelijen telah semakin mendapatkan sorotan penting. Pelayanan intelijen memiliki tanggung jawab krusial dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang relevan untuk mendukung keamanan nasional dan Kamtibmas di suatu wilayah. Khususnya, dalam konteks Polda Bali, wilayah yang dikenal dengan keanekaragaman budaya dan potensi pariwisata yang besar, sinergi peran pelayanan intelijen menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban

Tujuan utama penulisan esai ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai peran pelayanan intelijen dalam menciptakan Kamtibmas di wilayah Polda Bali. Dengan menguraikan pentingnya kerjasama antara pelayanan intelijen dengan lembaga penegak hukum, serta memberikan contoh konkret tentang bagaimana sinergi tersebut telah berhasil diterapkan dalam konteks Bali, esai ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana pelayanan intelijen turut berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. Pernyataan Pendahuluan Mengenai Pentingnya Kamtibmas dan Peran Intelijen dalam Mencapainya:

Kamtibmas, singkatan dari Keamanan, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat, tidak hanya sekadar sebuah istilah, melainkan sebuah konsep fundamental yang menggambarkan landasan utama bagi perkembangan harmonis suatu masyarakat. Keberadaan Kamtibmas berarti masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa

rasa takut terhadap ancaman kejahatan, ketidakamanan, atau gangguan lain yang dapat mengganggu tatanan sosial dan kesejahteraan. Kamtibmas merupakan panggung dimana masyarakat dapat mengembangkan potensi mereka tanpa hambatan yang tidak perlu.

Dalam upaya mencapai Kamtibmas, peran intelijen memegang posisi yang tak ternilai. Pelayanan intelijen, sebagai penyedia informasi yang berkualitas tinggi tentang potensi ancaman dan kejadian yang berkaitan dengan keamanan, memiliki peran penting dalam memberikan panduan bagi langkah-langkah pencegahan, penindakan, dan respons yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

2. Penjelasan tentang Tujuan Penulisan Esai dan Panduan Topik yang Akan Dibahas:

Tujuan utama penulisan esai ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai peran sinergis antara pelayanan intelijen dan keamanan masyarakat dalam mencapai Kamtibmas yang optimal, dengan fokus pada konteks Polda Bali. Esai ini bertujuan untuk membahas bagaimana peran intelijen sebagai pengumpul dan analisis informasi mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bagaimana kerjasama dan sinergi antara lembaga intelijen dan lembaga penegak hukum menciptakan lingkungan yang aman dan stabil.

Panduan topik yang akan dibahas dalam esai ini meliputi:

- (1) Pengenalan tentang pentingnya Kamtibmas sebagai landasan bagi masyarakat yang berkembang secara harmonis.
- (2) Peran pelayanan intelijen dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyediakan informasi yang relevan bagi pemahaman mengenai ancaman dan potensi kejahatan.
- (3) Bagaimana sinergi antara lembaga intelijen dan lembaga penegak hukum mendukung pencapaian tujuan Kamtibmas.
- (4) Tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta solusi yang dapat diimplementasikan.

- (5) Contoh kasus nyata yang menggambarkan bagaimana sinergi antara pelayanan intelijen dan lembaga terkait telah berhasil dalam mengatasi tantangan Kamtibmas di wilayah Polda Bali.

Melalui eksplorasi terhadap panduan topik tersebut, esai ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peran pelayanan intelijen secara khusus berkontribusi dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat yang lebih baik di wilayah Polda Bali.

3. Pemaparan Mengenai Signifikansi Keamanan dan Kamtibmas dalam Masyarakat:

Keamanan dan Kamtibmas merupakan fondasi yang tidak dapat digantikan dalam membangun masyarakat yang berfungsi dengan baik. Keamanan tidak hanya menyangkut kondisi bebas dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup rasa aman psikologis dan sosial yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan tanpa rasa cemas. Kamtibmas, sebagai konsep yang lebih komprehensif, melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan tatanan sosial yang stabil

4. Penjelasan tentang Dampak Positif Kamtibmas terhadap Perkembangan Ekonomi, Sosial, dan Budaya:

Dampak positif Kamtibmas yang terjalin kuat dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya adalah hal yang tak terbantahkan. Dalam situasi di mana Kamtibmas terjaga, berbagai sektor akan merasakan manfaatnya:

- (1) Perkembangan Ekonomi: Keamanan dan ketertiban menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis dan investasi. Masyarakat, termasuk pelaku usaha, cenderung lebih percaya diri untuk melakukan transaksi bisnis tanpa khawatir tentang ancaman keamanan. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan hasil alami dari Kamtibmas yang baik.
- (2) Kesejahteraan Sosial: Kamtibmas yang solid mendukung kesejahteraan sosial. Masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa gangguan atau ketakutan

akan kejahatan. Ini memungkinkan mereka untuk fokus pada hal-hal yang lebih positif seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan diri.

- (3) Kehidupan Budaya yang Kaya: Di wilayah seperti Bali, yang dikenal dengan keanekaragaman budayanya, Kamtibmas berperan penting dalam melindungi warisan budaya. Lingkungan yang aman dan stabil memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas budaya tanpa gangguan.
- (4) Pariwisata dan Industri Kreatif: Daerah dengan Kamtibmas yang baik cenderung lebih menarik bagi pariwisata dan industri kreatif. Para wisatawan merasa nyaman berkunjung dan berinteraksi dengan masyarakat lokal, yang pada gilirannya meningkatkan pemasukan dan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
- (5) Penguatan Keamanan Nasional: Kamtibmas yang terjaga di tingkat lokal juga mendukung keamanan nasional. Daerah yang stabil cenderung lebih sulit menjadi tempat pelarian atau sarang kejahatan transnasional, yang pada akhirnya mendukung stabilitas di tingkat lebih tinggi.
- (6) Kualitas Hidup yang Lebih Baik: Secara keseluruhan, Kamtibmas yang baik berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat. Rasa aman, stabilitas sosial, dan lingkungan yang bebas dari ketidakamanan secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan individu.

Dengan demikian, keamanan dan Kamtibmas bukanlah sekadar tujuan di akhir jalan, melainkan fondasi yang mendukung perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

BENTUK KEGIATAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENGGALANGAN DAN PEMBINAAN ANTISIPASI GANGGUAN ANCAMAN DAN KONFLIK SBG BERIKUT :

Bentuk kegiatan penggalangan dan pembinaan terhadap masyarakat di wilayah hukum Polda Bali meliputi berbagai bidang baik social,kebudayaan, kemasyarakatan dan bentuk pengawasan dan aliran yang ada di dalam kehidupan Masyarakat Bali

TPST KESIMAN - KERTALANGU



DESA ADAT PENARUNGAN



PENUTUPAN PORTAL, BULELENG



BUGBUG, KARANGASEM



- Kegiatan Pengamanan Dan Penggalangan Yang Di Lakukan Terhadap Masyarakat Dan Pengusaha Properti Menyangkut Pembebasan Tanah Dan Wilayah, Yang Berada Di Wilayah Desa Adat Bugbug.

Dengan Tuntutan Sbb :

- Kami Masyarakat Bugbug Menolak Pembangunan Resort Mewah Di Kawasan Lindung Bukit Gumang.
- Resort Mewah Bukit Gumang Yang Sepatutnya Wajib Amdal, Mari Jaga Bisama Leluhur Dan Lindungi Kawasan Suci Pura Gumang.
- Hentikan Eksploitasi Kawasan Bukit Gumang.
- Kawasan Bukit Gumang Adalah Suci Jangan Di Komersial.

Yang Mendukung Pembangunan Neano Cliff Resort Ds Bugbug Karangasem :

- Prajuru Dulun Desa, Desa Adat Bugbug Ke Kantor Dprd Kabupaten Karangasem Dan Kantor Bupati Karangasem Yang Dipimpin Oleh Kelian Desa Adat Bugbug I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, St
- Proyek Pembangunan Resort Tidak Melanggar Tata Ruang & Jauh Dari Pura Bukit Gumang Serta Tanah Desa Sekitar 2 Hektare Dikontrakkan Selama 25 Tahun Kepada Investor.
- Perjanian Dengan Investor Yakni 70% Dari Karyawan Nantinya Adakah Krama Desa Adat Bugbug Serta Desa Jasri, Desa Ngis, Dan Desa Lain Yang Ada Kaitannya Dengan Desa Bugbug.
-

BAB II

PERAN PELAYANAN INTELIJEN DALAM MENCIPTAKAN KAMTIBMAS DI WILAYAH POLDA BALI

Upaya kegiatan kepolisian PREMTIF dengan mengedepankan fungsi intelijen lidik , pengamanan, pengalangan untuk menciptakan kamtibnas yang kundusif

5. Definisi Peran Pelayanan Intelijen dalam Mendukung Kamtibmas:

Pelayanan intelijen memiliki peran utama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyediakan informasi yang relevan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Di wilayah Polda Bali, peran ini menjadi lebih penting karena kompleksitas budaya, keragaman masyarakat, dan potensi pariwisata yang tinggi. Dalam upaya untuk menciptakan Kamtibmas yang optimal, pelayanan intelijen berfungsi sebagai mata dan telinga yang mengidentifikasi potensi ancaman dan mendukung lembaga penegak hukum dalam mengambil tindakan preventif dan responsif.

6. Pengumpulan Informasi dan Analisis Intelijen:

Pelayanan intelijen aktif terlibat dalam pengumpulan beragam informasi dari berbagai sumber. Melalui teknik-teknik seperti pemantauan media, analisis sosial, dan observasi lapangan, intelijen mengidentifikasi pola perilaku dan tren ancaman yang berpotensi mengganggu Kamtibmas. Informasi yang terkumpul dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi risiko.

7. Deteksi Ancaman dan Respons Cepat:

Peran penting lainnya adalah mendeteksi potensi ancaman sebelum berdampak serius pada keamanan masyarakat. Dengan memadukan informasi yang diperoleh, pelayanan intelijen memberikan peringatan dini kepada lembaga penegak hukum. Respons yang

cepat dan efektif dapat dihasilkan, memungkinkan penanganan situasi yang mengancam Kamtibmas.

8. Sinergi dengan Instansi Terkait:

Kerjasama yang erat antara pelayanan intelijen dan lembaga penegak hukum adalah elemen penting dalam menjaga Kamtibmas. Pertukaran informasi yang cepat dan akurat memfasilitasi rencana pencegahan dan penindakan yang lebih baik. Sinergi ini juga menghasilkan pendekatan yang terintegrasi dalam menjaga keamanan masyarakat.

9. Pembentukan Rencana Preventif:

Pelayanan intelijen membantu merumuskan rencana tindakan preventif berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Tindakan ini melibatkan penguatan patroli, pemantauan wilayah yang rawan, dan peningkatan keamanan di tempat-tempat vital. Upaya preventif ini mencegah perkembangan situasi yang dapat mengganggu Kamtibmas.

10. Dampak Informasi Akurat terhadap Keputusan Strategis:

Keputusan strategis dalam menjaga Kamtibmas didasarkan pada informasi yang akurat dan mendalam. Pelayanan intelijen memberikan wawasan penting mengenai perkembangan situasi keamanan, membantu lembaga terkait merencanakan kebijakan, alokasi sumber daya, dan strategi jangka panjang.

11. Sinergi sebagai Fondasi:

Dalam dunia yang terus berubah dan kompleksitas ancaman yang semakin tinggi, sinergi antara pelayanan intelijen, lembaga penegak hukum, dan instansi terkait menjadi dasar keberhasilan menjaga Kamtibmas. Kerja sama ini menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis bagi masyarakat Polda Bali

I. TOPIK JUDUL

Judul;

“Strategi Membangun Kerjasama Organisasi Masyarakat Adat Untuk Mencegah Terjadinya Konflik Sosial Di Bali”.

Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya keamanan di wilayah Bali melalui integritas dan sinergitas fungsi Intelijen”.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan kemampuan deteksi aksi dan sinergitas dalam mewujudkan keamanan di wilayah Bali;
- 2) Mewujudkan sistem manajemen Intelkam yang modern, akuntabel dan berdaya saing.

II. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara berpenduduk multietnik. Memiliki ciri khas adat-istiadat masing-masing. Hidup berkelompok dan menjunjung tinggi asal usul leluhur secara turun temurun diatas suatu wilayah yang ada dan memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan social budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan nasional dimuat dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan terhadap masyarakat adat terdapat juga dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 6 ayat 1 dan 2. Pasal 6 ayat 1 berbunyi:”Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

Data Statistik Potensi Desa (Podes) tahun 2018 menunjukkan hampir 3.150 desa atau 3,75% dari total 84.000 desa di Indonesia rawan konflik sosial. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Polri tahun 2019 ada 26 peristiwa besar Konflik sosial yang terjadi, baik horizontal maupun vertikal. Berdasarkan hasil laporan informasi Polda Bali selama kurun waktu 2 (Dua) tahun terakhir ini ada 44 kejadian konflik social,

Tahun 2019 ada sebanyak 19 kasus konflik sosial dan ditahun 2020 ada sebanyak 25 kasus konflik social yang tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota.

Hasil *Mapping* laporan tersebut menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di dominasi terkait sengketa lahan baik yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah maupun pihak swasta atau pihak penguasa terhadap yang mengatasmankan Ormas Adat bahkan konflik social terjadi sesama Ormas Adat itu sendiri. AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menjadi aliansi atau menjembatani forum setiap masyarakat adat terhadap pemerintahan yang ada.

Melihat kasus di atas, ketika terjadi kriminalisasi seluruh upaya yang dibangun sejak awal untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat menjadi berhenti. kekuatan dikerahkan seperti seluruh komunitas, para pendamping, paralegal, maupun pengacara masyarakat adat untuk mendampingi masyarakat yang dikriminalkan. Peran Penegak hukum memiliki fungsi mengayomi, mengawasi dan sebagai fungsi penindakan diharapkan untuk mampu mengupayakan secara dini *preventif* (pencegahan) sebelum terjadinya konflik.

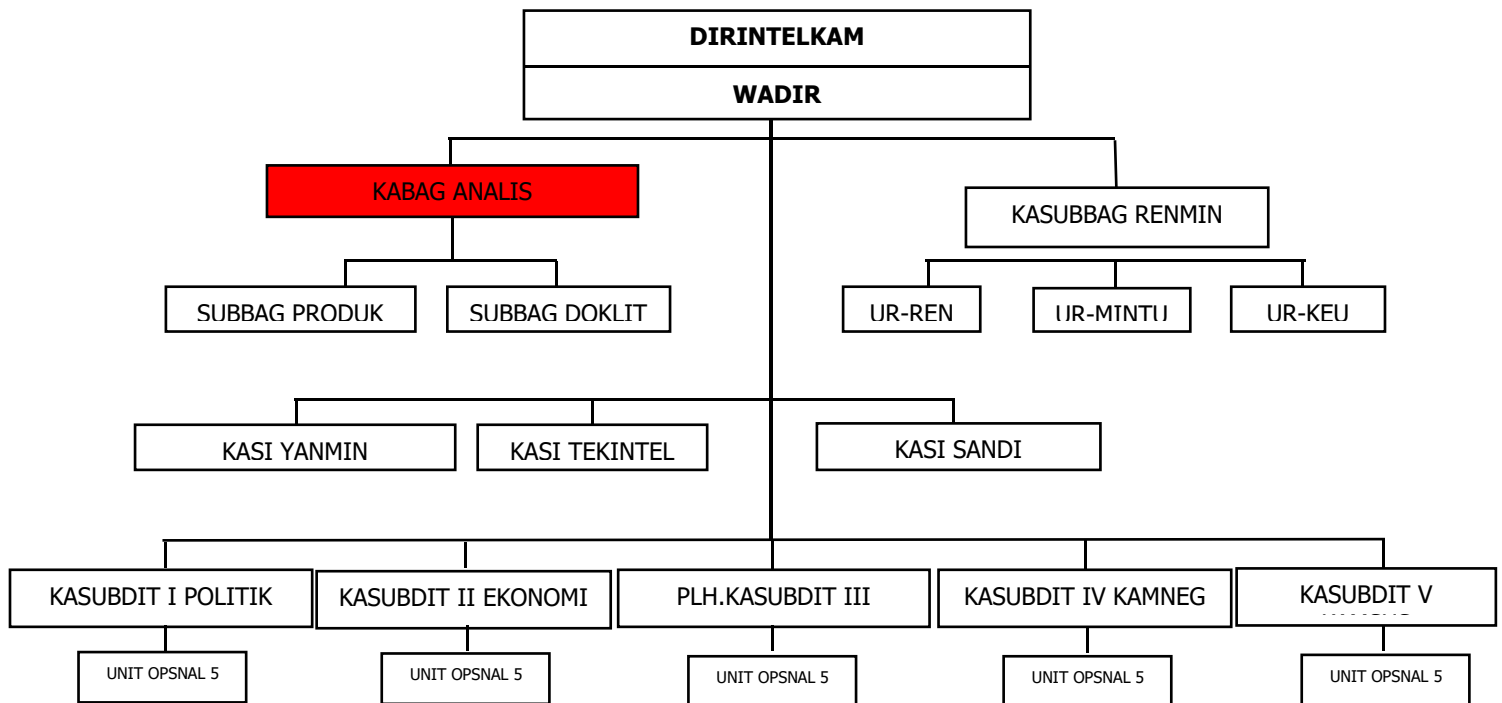
III. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

UUD 1945 Pasal 18B mengakui “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan data Di Bali Data konflik social terjadi. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Polri tahun 2019 ada 26 peristiwa besar Konflik sosial yang terjadi, baik horizontal maupun vertikal. Di Bali sendiri selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini ada 44 kejadian konflik social.

Upaya meminimalisir terjadinya konflik perlu peran adanya serta kelompok masyarakat adat itu sendiri. Peran penegak hukum mengayomi, mengawasi sekaligus sebagai lembaga mediasi urut andil dalam upaya pencegahan secara dini terjadinya konflik. Dengan implementasi dari proyek perubahan ini yang berjudul “*Strategi Membangun Kerjasama Diantar Organisasi Masyarakat Adat Untuk Mencegah Terjadinya Konflik Social Di Bali*” melalui adanya Deklarasi, serta Pernyataan sikap bersama maupun

terbentuk Forum Silaturahmi yang bertujuan menciptakan Keamanan, ketertiban, dan kedamaian di masyarakat Bali.

STRUKTUR DITINTELKAM POLDA BALI



IV. ANALISIS GAP

Tabel dibawah ini adalah analisis kesenjangan kondisi yang terjadi saat ini maupun kondisi yang akan terjadi setelah diintervensi dari proyek perubahan ini:



DATA POTENSI KONFLIK PERMASALAHAN TANAH

NO	Jenis Konflik	Pihak-pihak yang berkonflik	Akar Permasalahan	Kronologis Konflik	POTENSI TERJADI KONFLIK FISIK BERULANG	Upaya yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
	Permasalahan tanah dgn status tanah adat (keabsahannya masih dalam pengurusan) yg terletak di Br. Sental Kangin Desa Ped Kec. Nusa Penida Klungkung	Kelompok Made Sudiarta dengan Kelompok SENGEL .	Kliang Br Adat Sental Kangin memberikan kebijakan membuka usaha dengan mendaftarkan diri di Br Adat Sental Kangin yang akan dibagi menjadi 3 blok. Dari ketiga blok tersebut terdapat kelompok Made Sudiarta yang semula anggotanya terdiri 24 orang yang mendapat bagian di blok barat seluas 70 meter namun kelompok SENGEL juga ingin mendapat bagian di blok barat	Pada awalnya tanah yang menjadi permasalahan tersebut adalah Tanah Negara (TN) yang ditempati oleh warga Br Sental Kangin, yang saat itu bekerja menanam rumput laut yang terletak dipinggir pantai Br Sental Kangin Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Klungkung. Setelah situasi rumput laut tidak bisa menghasilkan lagi maka dari beberapa warga meninggalkan rompok tersebut, namun masih ada beberapa yang masih beraktivitas di rompok tersebut seperti misalnya berjualan atau dipakai tempat singgah ketika mereka ke pantai. Melihat situasi tersebut, maka dari pihak Prajuru Br Adat Sental Kangin mengusulkan bahwa tanah yang terletak di pinggir pantai yang berisi rompok-rompok yang kumuh akan ditata dan akan dimohonkan oleh Br Adat untuk dijadikan laba pura segara, dari usulan tersebut maka warga Br Adat melaksanakan rapat terkait maksud para prajuru tersebut dan dari hasil rapat maka pihak warga adat menyetujui usulan tersebut. Karena usulan untuk menata wilayah tersebut disetujui semua rompok yang ada akan dibongkar dan Dibersihkan, selanjutnya dilakukan usulan tanah tersebut menjadi laba pura segara Br Sental Kangin dan saat ini masih dalam proses. Setelah berlalu beberapa tahun maka dari pihak Kliang Br Adat Sental Kangin	SEDANG	Melaksanakan monitor thd permasalahan tanah di Banjar Sental Kangin Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Klungkung dan melaksanakan penggalangan thd tomas, todat dan elemen masyarakat Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Klungkung.	- Mendorong Forkopimda dan MDA Kab Klungkung bersama stakeholder terkait lainnya utk melaks rakor dalka penyelesaian tanah di Banjar Sental Kangin Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Klungkung. - Meningkatkan kegiatan pengamanan dan patroli dialogis di kawasan Nusa Penida utk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat

				memberikan kebijakan terhadap tanah tersebut yaitu barang siapa yang mau membuka usaha di tanah tersebut agar mendaftarkan diri di Br Adat Sental Kangin yang akan dibagi menjadi 3 blok yaitu : a. Blok paling barat khusus diperuntukan warga yang mau membuka usaha dibidang pariwisata, seperti misalnya Beach Club Restauran atau sejenisnya. b. Blok tengah diperuntukan bagi warga yang mau buka usaha dibidang kuliner. c. Blok timur diperuntukan bagi warga yang mau jualan alat Banten atau canang. Dengan dibukanya kawasan tersebut untuk warga yang membuat usaha maka seluruh warga mendaftarkan diri yang kemudian terbagi menjadi 7 kelompok warga. Salah satu kelompok tersebut adalah kelompok Made Sudiarta yang semula anggotanya terdiri 24 orang yang mendapat bagian di blok barat seluas 70 meter saat ini sudah dibangun untuk usaha mereka atas bagian tersebut dari salah satu kelompok yaitu kelompok SENGEL ingin juga mendapat bagian di blok barat. Dari keputusan Krama terhadap 3 (tiga) warga ini maka terjadinya polemik di Warga adat Br Sental Kangin dan rencananya masalah ini akan dilaksanakan rapat mediasi untuk menyelesaikan masalah ini yang nantinya menghadirkan Majelis			
--	--	--	--	---	--	--	--

				Adat Alitan, pihak yang bermasalah Kelompok Made Sudiarta dan Kelompok SENGEL serta Prajuru Desa Adat Sental Kangin."			
2	Permasalahan salah satu Tanah Aset yang berlokasi di wilayah Desa Pejarakan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng	Pemohon Sugiarto warga yang beralamat di Banjar Dinas Marga Garuda, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan PT. Prapat Agung Permai yang saat ini sudah berdiri Hotel MDR (Menjangan Dynasty Resort) dengan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan)	Permasalahan berawal dari Pemkab Buleleng yang memberikan salah satu Tanah Aset yang berlokasi di wilayah Desa Pejarakan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng kepada Badan usaha yaitu PT. Prapat Agung Permai dalam bentuk HGB (Hak Guna Bangunan) yang mana saat ini sudah berdiri Hotel MDR (Menjangan Dynasty Resort), yang mana sebagian warga mengklaim secara turun temurun telah menggarap tanah tersebut dan rencananya akan digunakan untuk bercocok tanam palawija/Bertani.	Permasalahan berawal dari Pemkab Buleleng yang memberikan salah satu Tanah Aset yang berlokasi di wilayah Desa Pejarakan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng kepada Badan usaha yaitu PT. Prapat Agung Permai dalam bentuk HGB (Hak Guna Bangunan) yang mana saat ini sudah berdiri Hotel MDR (Menjangan Dynasty Resort), yang mana sebagian warga mengklaim secara turun temurun telah menggarap tanah tersebut dan rencananya akan digunakan untuk bercocok tanam palawija/Bertani. Oleh karena itu, warga masyarakat pemohon menunjuk Nyoman Tirtawan untuk diberi kuasa dalam mengurus tanah tersebut, karena dianggap sebagai tokoh masyarakat dan pihak yang dipercayai dapat memperjuangkan aspirasi warga.	SEDANG	Melaksanakan penggalangan terhadap para tokoh dan warga di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	1. Mendorong perangkat Desa (Todat, Tomas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)), Perbekel) agar melakukan pendekatan terhadap kelompok warga Desa Pejarakan agar menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. 2. Mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas Desa Pejarakan agar monitoring perkembangan situasi khususnya di wilayah Banjar Dinas Batuampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. 3. Mendorong Forkompinda Kabupaten Buleleng untuk membuka ruang mediasi dengan mengundang para pihak agar secepatnya dapat menuntaskan permasalahan tanah tersebut dan meredam

							gejolak masyarakat Desa
3	Permasalahan permohonan tanah HPL menjadi SHM oleh warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk (AMPTAG).	Pemkab Jembrana dengan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk (AMPTAG)	Warga Gilimanuk selaku penyewa menginginkan tanah tsb agar menjadi hak milik namun disisi lain Pemerintah Kab. Jembrana tidak bisa memenuhi keinginan warga tersebut karena adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2016	Warga Gilimanuk selaku penyewa berupaya memperjuangkan tanah tsb menjadi hak milik (SHM) karena diklaim sudah ditempati secara turun temurun dan membayar kewajiban/pajak kpd Pemerintah. Bahkan setiap adanya moment politik, terdapat banyak elit politik yg berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga tsb namun hingga saat ini janji mereka belum terealisasi karena tanah tersebut merupakan Aset Pemerintah Kab. Jembrana.	SEDANG	Melakukan penyelidikan terkait perkembangan permasalahan tersebut. Melakukan penggalangan terhadap Tomas, Toga, Todat dan Topol agar tidak mudah terpancing terhadap provokasi serta bersama sama menjaga situasi Kamtibmas tetap Kondusif.	1. Mendorong Forkompinda Kab. Jembrana untuk segera melaksanakan Rapat Koordinasi dengan mengundang seluruh elemen dan perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk (AMPTAG), untuk dapat segera menuntaskan permasalahan tanah tersebut dengan opsi-opsi penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Mendorong Pemkab Jembrana bersama pihak legislatif untuk segera menyusun regulasi khusus untuk mengatur penataan dan pengelolaan aset Pemerintah, sehingga dapat segera diinventarisasi & validasi data kepemilikan hak sehingga kedepan dapat meningkatkan PAD demi kesejahteraan masyarakat
4	Permasalahan sengketa tanah Pelaba Pura Dalem Dwi Jendra dan	Warga Banjar Pande, Desa Adat	Pihak Bendesa Adat Abiansemal dengan dasar pipil 802 dan kemudian	Awal permasalahan terjadi pada tahun 1985, yang mana pada saat itu Desa Abiansemal	SEDANG	Melaksanakan gal thdp Tomas, Todat dan elen warga	1. Mendorong Forkopimda Kab Badung untuk segera

	Pelaporan Kelian Banjar Pande ke Polda Bali oleh Bendesa Adat Abiansemal	Abiansemal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung dengan Kelian Banjar Pande Desa Adat Abiansemal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung	tanah pelaba pura Dalem Dwijendra tersebut dimasukkan kedalam awig-awig sebagai tanah druen Desa Adat Abiansemal. (Awig-awig Perubahan). Setelah tanah pelaba Pura Dalem Dwijendra dimasukkan kedalam awig-awig, kemudian pihak pengempon Pura Dalem Dwijendra merasa keberatan sehingga terjadi mediasi antara pihak pengempon Pura Dalem Dwijendra dengan pihak pengurus Desa Adat dan dari hasil mediasi tersebut masing-masing pihak yaitu pengempon Pura Dalem Dwijendra dengan pengurus Desa Adat sama-sama bersikukuh terkait kepemilikan tanah tersebut.	mengikuti lomba Desa, sehingga dilakukan pendataan dan mengadministrasikan aset-aset yang dimiliki oleh Desa Adat Abiansemal, kemudian melakukan pengukuran terhadap tanah pelaba Pura Dalem Dwijendra yang berlokasi di Br. Pande Abiansemal Kabupaten Badung, pada saat dilakukan pengukuran tersebut dari warga pihak Br. Pande yang merupakan pengempon Pura Dalem Dwijendra telah melarang untuk dilakukan pengukuran, namun dari pihak Bendesa adat menyampaikan bahwa apabila tanah yang telah dilakukan pengukuran tersebut milik dari Pura Dalem Dwijendra nantinya akan dimasukkan sebagai aset Pura Dalem Dwijendra. Pada tahun 1988 terbit SKPT terhadap tanah pelabe Pura Dalem Dwijendra yang telah dilakukan pengukuran oleh pihak Bendesa Adat Abiansemal dengan dasar pipil 802. Dan kemudian tanah pelaba pura Dalem Dwijendra tersebut dimasukkan kedalam awig-awig sebagai tanah druen Desa Adat Abiansemal. (Awig-awig Perubahan). Setelah tanah pelaba Pura Dalem Dwijendra dimasukkan kedalam awig-awig, kemudian pihak pengempon Pura Dalem Dwijendra merasa keberatan sehingga terjadi mediasi antara pihak pengempon Pura Dalem Dwijendra dengan pihak pengurus Desa Adat dan dari hasil mediasi tersebut masing-masing pihak yaitu pengempon Pura Dalem Dwijendra dengan pengurus Desa Adat sama-sama		dimasing-masing pihak utk jaga kamtibmas.	melaksanakan rapat koordinasi guna dapat membahas permasalahan sengketa tanah Pelaba Pura Dalem Dwi Jendra sehingga dapat segera dirumuskan nota kesepakatan antara kedua belah pihak. 2. Mendorong BPN Kabupaten Badung untuk melaksanakan pertemuan kembali dengan kedua belah pihak dalam rangka memberikan penjelasan dan klarifikasi atas proses pensertifikata n atas objek tersebut, sehingga dapat diperoleh win-win solution atas sengketa tanah di Desa Adat Abiansemal Badung.
--	---	---	---	---	--	--	--

				bersikukuh terkait kepemilikan tanah tersebut. Kemudian pada tahun 2017 dilakukan kembali revisi terhadap awig-awig Desa Adat Abiansemal. Terkait revisi awig-awig tersebut warga dari Br. Pande yang merupakan pengempon pura dalem Dwijendra merasa keberatan karena masih ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan yaitu dimuatnya tanah pelaba pura dalem Dwijendra ke dalam awig-awig. Namun dari pihak bendesa adat tetap bersikukuh bahwa tanah tersebut merupakan tanah Desa Adat dan kemudian melakukan pemasupatian terhadap awig-awig yang telah dibuat.			
--	--	--	--	---	--	--	--

POTENSI GANGGUAN 2023

NO	POTENSI GANGGUAN	LANGKAH INTELIJEN	REKOMENDASI
1	KEJAHATAN JALANAN CURAT, CURAS & CURANMOR SASARAN WNA, TERUTAMA DI DAERAH DESTINASI WISATA	DETEKSI & MONITORING DAERAH RAWAN KEJAHATAN :KUTA, SEMINYAK, CANGGU, JIMBARAN, PECATU	- SATWIL GELAR KRYD, PATROLI SKALA SE&G & BESAR DI DAERAH RAWAN KEJAHATAN - PENGGELARAN SIMBOL KEPOLISIAN (PERS & RAN PATROLI) DI AREA PUBLIK UTK BERI RASA AMAN & MENIADAKAN KESEMPATAN KEJAHATAN - BENTUK UKL DI TITIK RAWAN KEJAHATAN - BERDAYAKAN PAM SWAKARSA - PECALANG & SECURITY KAWASAN
2	ANCAMAN TEROR - KERAWANAN THD RANMOR & DRIVER DELEGASI YG DISEDIAKAN OLEH EO (HOST KEMENTERIAN), YG TIDAK CUKUP WAKTU UNTUK DILAKUKAN SPOTTING & SCREENING OLEH INTELIJEN & DENSUS 88/AT - KONEKSI JARINGAN EKS NAPITER SIMPATISAN ISIS, NIL, JAD & JAT DI BALI DGN NAPITER YG BERADA DI LAPAS GUNUNG SINDUR JAWA BARAT - BEBASNYA EKS NAPITER AN. TAUFIKURRAHMAN & ZAID ALI IBRAHIM, BERAFFILIASI DGN PIMPINAN ISIS SERTA ARIEFFUDIN & LUKMAN HAKIM NII BALI	- MONITORING AKTIVITAS TAUFIKURRAHMAN & ZAID ALI IBRAHIM, ARIEFFUDIN & LUKMAN HAKIM NII BALI. - PERKETAT PENGAWASAN 3 LAP TEMBAK TERKAIT AKTIVITAS MENEMBAK, PENYIMPANAN SENPI DI GUDANG PERBAKIN SERTA KEPEMILIKAN SENPI ORGANIK & NON ORGANIK POLRI.	- PENGAWASAN EKS NAPITER & POK INTOLERAN OLEH BHABINKAMTIBMAS SETEMPAT - PENGAWASAN AKTIVITAS DAKWAH YG MENGANUT PAHAM RADIKAL DI POK PENGAJIAN, MUSHOLLA & MASJID OLEH BHABINKAMTIBMAS. - LAKUKAN PATROLI SIBER - WAS THD TOKO PENJUAL BAHAN KIMIA
3	WAS PINTU MASUK BALI MASUKNYA POK PAPUA MELALUI PEL. GILIMANUK & PADANG BAI	- MELAKUKAN PAM PENEBALAN DI PINTU MASUK. - MELAKUKAN	PEMANTAUAN POLAIR DI JALUR TIKUS (DERMAGA RAKYAT)

	- MASUKNYA POK GREENPEACE & NGO LAINNYA DARI BANYUWANGI, JAWA TIMUR MENUJU GILIMANUK BALI - TERDAPAT 43 AKSES JALUR TIKUS MASUK KE BALI, DERMAGA-DERMAGA RAKYAT DI PELABUHAN GILIMANUK & PADANG BAI - VIRALISASI PLAYING VICTIM POK PAPUA TERKAIT INTIMIDASI OLEH PETUGAS PELABUHAN TTG PEMBATAAN ORANG YG AKAN MASUK KE BALI	PENGAWASAN THDP PEMERIKSAAN BARANG YG MASUK DI PELABUHAN GILIMANUK, PA&G BAI, BENOA & CELUKAN BAWANG. MELAKUKAN PENGAWASAN THD POK PAPUA DI PELABUHAN GILIMANUK & PADANG BAY ANTISIPASI MASUKNYA AMP JATIM & NTB KE BALI.	SCREENING (PERIKSA IDENTITAS & DATAKAN) INTROGRASI MAKSUD & TUJUAN KE BALI SERTA AWASI POK PAPUA DARI JATIM & NTB YG MASUK BALI.
4	ISU LINGKUNGAN HIDUP - RENCANA GIAT AKSI DAMAI & MIMBAR BEBAS ASPIRASI OLEH KMHDI DENPASAR DI KONSULAT JEPANG, KECAM PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT LIMBAH NUKLIR JEPANG (WAKTU & TEMPAT BELUM DITENTUKAN) - RENCANA AKSI UNRAS BEM UNUD, ELEMEN MAHASISWA, AMP, LSM & POK AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP, MENGKRITISI KTT AIS 2023 DI BALI (WAKTU & TEMPAT BELUM DITENTUKAN). - PROTES PEMBANGUNAN PEL SANGSIT BULELENG OLEH WALHI, KEKAL & FRONTIER.	- MELAKUKAN MONITORING & PULBAKET TERHADAP PENGURUS KMHDI DENPASAR TERKAIT DGN REN AKSI UNRAS - MELAKUKAN MONITORING & PULBAKET TERKAIT DGN REN AKSI UNRAS BEM UNUD - MELAKUKAN PULBAKET & MONITORING KANTOR WALHI BALI, AKTIVITAS & MONITORING MEDSOS.	- MELAKS PENGALANGAN THDP PENGURUS KMHDI BALI - MELAKS PAMKA/PAMTUP SETIAP GIAT BEM UNUD SBG INISIATOR AKSI UNRAS TOLAK KTT AIS 2023 SERTA PENGALANGAN TERHADAP KETUA BEM UNUD - MELAKS PENGALANGAN TERHADAP TODAT, TOMAS SERTA POK NELAYAN PESISIR SANGGIT AGR TIDAK TERPENGARUH IKUT SERTA MELAKUKAN AKSI PROTES/UNRAS OLEH POK WALHI,KEKAL & FRONTIER TERKAIT PEMBANGUNAN PEL SANGSIT.
5	PENOLAKAN PERLUASAN BANDARA NGR RAI OLEH NELAYAN TUBAN POK NELAYAN MINA SEGARA SBG PENGELOLA KEGIATAN USAHA UTAMA PENANGKAPAN LOBSTER & WISATA AIR,PARKIR & KULINER YG AKAN TERDAMPAK AKIBAT ALOKASI PENGEMBANGAN BANDARA YG MEMERLUKAN LAHAN	TELAH DILAKS TATAP MUKA & DIALOG BERSAMA POK NELAYAN MINA SEGARA DLM GIAT “JUMAT CURHAT” GUNA MENYERAP LANGSUNG ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK MENJALIN KEMITRAAN ANTARA POLRI & MASYARAKAT	- MELAKS PENGALANGAN THDP POK NELAYAN MINA SEGARA AGAR TIDAK MELAKUKAN AKSI UNRAS. - MENDORONG PT. ANGKASA PURA 1 NGR RAI BERSAMA STAKEHOLDER &

	SELUAS 47 ha	▪ TELAH MELAKS KORDINASI DGN MENDORONG PT. ANGKASA PURA 1 NGR RAI & PT JASA ANGKASA SEMESTA (JAS) TERKAIT REN PENGEMBANGAN TSB	INKAIT UNTUK MELAKS SOSIALISASI PENDEKATAN THDP POK NELAYAN MINA SEGARA
6	ALIANSI MAHASISWA PAPUA ▪ DI BALI TERDAPAT 40 AKTIVIS AMP DARI LK. 700 ORANG PAPUA, TERKONSENTRASI PD 6 ASRAMA MAHASISWA PAPUA DI DENPASAR ▪ MASUKNYA 3 ORANG OAP DARI NTB PADA TGL 6 OKT 2023 MELALUI PEL LEMBAR MENUJU PEL PDG BAI BALI. ADAPUN IDENTITAS SBB: 1. NIFRAN KIWO (AMP) 2. DETRI R WANDIK (AMP) 3. MILENUS MANGAI (AMP) ▪ AKSI UNRAS, PEMBENTANGAN SPANDUK, MURAL, VANDALISME & DISKUSI DARING. ▪ MENUNTUT KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA, PELANGGARAN HAM OLEH AMP BALI, DGN KEGIATAN DISKUSI TERBATAS, GELAR BUDAYA & AKSI UNRAS	▪ PENGAWASAN THD POK PAPUA DI PELABUHAN GILIMANUK & PADANG BAI ▪ KOORDINASI DGN DIT IK POLDA NTB ▪ DETEKSI AKTIVITAS POK AMP DI BALI ▪ DETEKSI MUNCULNYA MURAL DI AREA PUBLIK & LAKUKAN PENGHAPUSAN ▪ PATROLI SIBER INTELIJEN ▪ PEGELARAN PEMANFAATAN ALSUS INTELIJEN (JAMMER & CEK POST) CEGAH VIRALISASI, LIVE STREAMING MELALUI MEDIA PROPAGANDA AMP	▪ PENCEGAHAN MASUKNYA POK PAPUA DI BALI ▪ WASKAT THDP AKTIVITAS POK PAPUA DI BALI ▪ KOORD DG POL PP MENCEGAH AKSI MURAL & VANDALISME ▪ BERDAYAKAN PECALANG & LINGKUNGAN SETEMPAT (BANJAR) DI ASRAMA PAPUA

Kesimpulan dan Saran

Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Polda Bali, sinergi antara pelayanan intelijen, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan berbagai pihak terkait membuktikan pentingnya kerja sama dalam mencapai tujuan bersama: menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.

Esai ini telah menguraikan peran krusial pelayanan intelijen dalam mendukung Kamtibmas. Keamanan dan ketertiban bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi bagi perkembangan positif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Sinergi antara berbagai lembaga dan komponen masyarakat membawa dampak positif yang signifikan. Kolaborasi ini memperkuat respons terhadap ancaman, meningkatkan

kualitas pengambilan keputusan, dan membentuk lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya.

**FOTO SIMAKRAMA YANG DILAKUKAN OLEH DITILETKAM POLDA BALI
DENGAN TUJUAN SILAH TURAHMI**







- Merupakan dari bendesa Provinsi Bali Bidang Agama , Tradisi dan Kearifan local
- Acara ini merupakan presepsi, tujuan polda bali hanya untuk keamanan
- Dalam aturan aturan pemerintah , aparat keamanan dan tokoh adat setempat , seta melakukan pengendalian diri

V. TUJUAN DAN MANFAAT UNTUK ORGANISASI ADAPTIF

A. Tujuan Jangka Pendek 60 Hari

- Terlaksananya Forum group Diskusi (FGD)
- Adanya Kesepakatan Bersama (MOU) Antar Ormas Adat
- Adanya Deklarasi Bersama Ormas Adat
- Terbentuknya Forum Silaturahmi dan Komunikasi Ormas Adat di tingkat Provinsi

B. Tujuan Jangka Menengah

- 1) Terbentuknya Forum Silaturahmi dan Komunikasi Ormas Adat di tingkat Kabupaten/Kota

- 2) Menurunnya kasus Konflik Sosial yang melibatkan Ormas Adat

C. Tujuan Jangka Panjang

Terciptanya Kamtibmas yang kondusif di wilayah Bali.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari proyek perubahan ini yaitu:

- 1) Internal
 - a. Memudahkan pengawasan Ormas Adat
 - b. Terpetakannya keberadaan organisasi masyarakat Adat
 - c. *Early warning and Early detection*
- 2) Eksternal
 - a. Meningkatkan jalinan kerjasama serta silaturahmi antar Ormas adat.
 - b. Ada wadah musyawarah dan mufakat antar Ormas adat.
 - c. Tidak terjadi Konflik social antar ormas Adat.

VI. OUTPUT DAN OUTCOME

A. Output

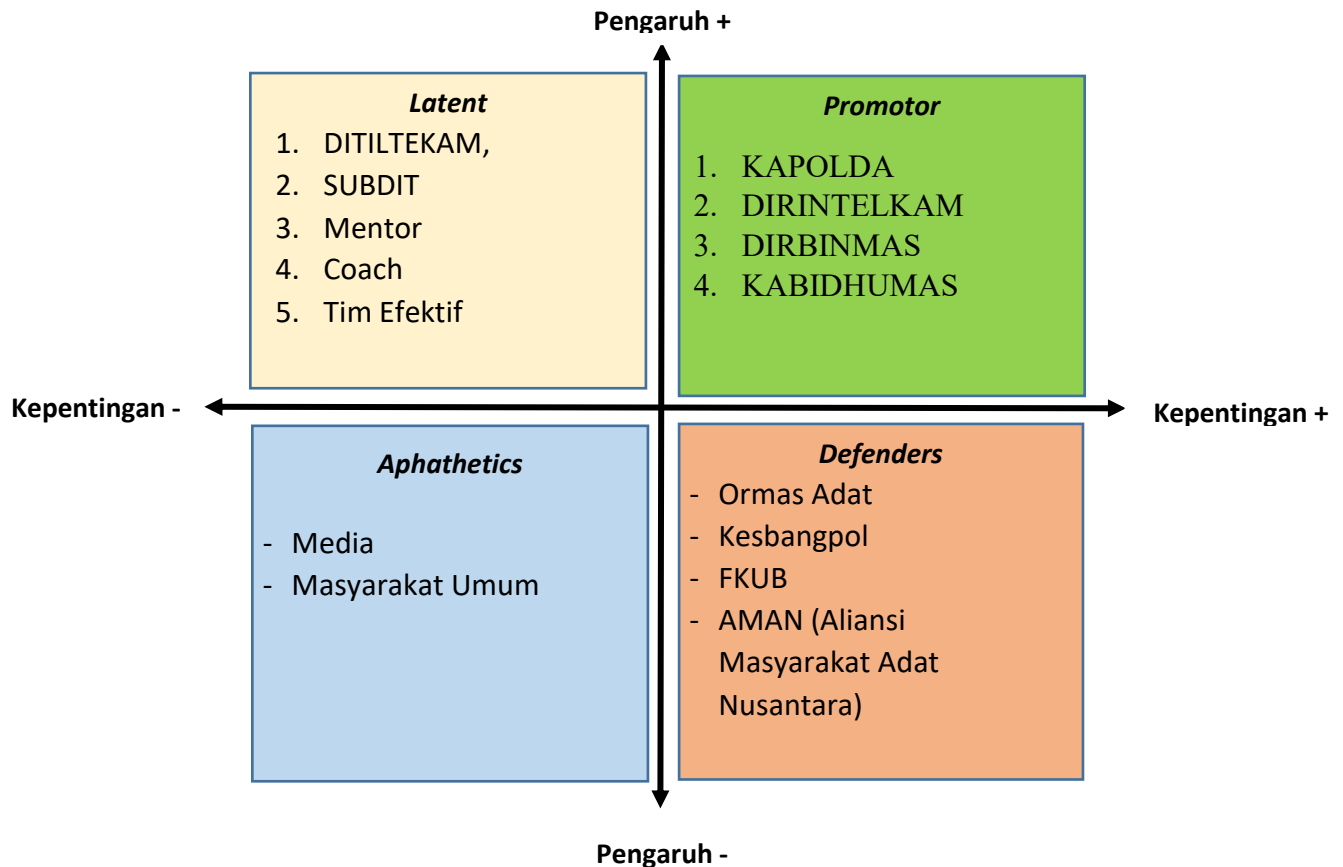
- 1) Meningkatnya kepedulian dan memiliki pemahaman bersama Organisasi Masyarakat Adat dalam upaya turut serta mencegah sedini mungkin terjadinya konflik social di masyarakat.
- 2) Bersama organisasi masyarakat adat mendeteksi secara dini sebelum terjadinya konflik social dimasyarakat.
- 3) Mendapatkan Perlindungan dan rasa aman keberadaan organisasi masyarakat adat dan masyarakat secara umum.
- 4) Ada Kesepakatan bersama dalam bentuk MOU sebagai alat *Warning system* untuk menghindari terjadinya konflik social di masyarakat.
- 5) Berjalannya Forum silaturahmi Organisasi Masyarakat Adat sebagai salahsatu bagian dari menjunjung tinggi falsafah Huma Betang.
- 6) Meminimalisir terjadinya kasus konflik social organisasi masyarakat adat di Bali.

B. Outcome

Adapun yang menjadi Outcome dalam proyek perubahan ini yaitu: *“Terjalinnnya kerjasama dan Tali Silaturahmi Organisasi masyarakat Adat sebagai bentuk tanggungjawab bersama untuk mencegah konflik Sosial di Masyarakat Bali”*.

VII. PEMETAAN STAKEHOLDERS

A. Peta Stakeholders (Metode Kuadran)



BENTUK KEGIATAN FGD YANG DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT :

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

DENGAN TEMA

**"PERAN ELEMEN MASYARAKAT MENCIPTAKAN
PEMILU TAHUN 2024 AMAN DAN DAMAI ”**

I. **PENDAHULUAN** :

A. **Dasar** :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Surat Direktur Intelkam Polda Bali nomor : Sprin/610/IX/IPP.3.3.19./2023 tanggal 7 September 2023 tentang kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Elemen Masyarakat Menciptakan Pemilu Tahun 2024 Aman Dan Damai”, bertempat di Puri Nusa Indah Hotel Jl. Waribang no 99 Denpasar.

B. **Personel** :

1. DIREKTORAT INTELKAM POLDA BALI

C. Maksud

C. **Maksud dan tujuan** :

1. Maksud kegiatan tersebut Memberikan informasi kepada pimpinan tentang hasil pelaksanaan kegiatan program Subdit III bidang *Sosial Budaya* Direktorat Intelkam Polda Bali dalam bentuk Focus Group Discussion dengan tema “Peran Elemen Masyarakat Menciptakan Pemilu Tahun 2024 Aman Dan Damai”, yang dilaksanakan tanggal 14 sd 15 September 2023 bertempat di Hotel Puri Nusa Indah Jl. Waribang Denpasar.
2. Memberikan pemahaman kepada peserta FGD yang terdiri dari beberapa komponen masyarakat yang berkecimpung dalam dunia Organisasi Masyarakat.
3. Tujuan kegiatan tersebut guna terciptanya sinergisitas antara Polri dengan elemen masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif menjelang Pemilu tahun 2024, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dan membantu tugas Polri dalam menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintah di kalangan masyarakat dan membantu mensukseskan Pemilu tahun 2024 di Provinsi Bali agar aman dan damai

II. **TUGAS POKOK** :

Melaksanakan kegiatan **Focus Group Discussion (FGD)** dengan tema “Peran Elemen Masyarakat Menciptakan Pemilu Tahun 2024 Aman Dan Damai” oleh Subdit III Direktorat Intelkam Polda Bali sesuai Renja T.A 2023.

III. RENCANA PELAKSANAAN TUGAS :

1. Menerima perintah dari Direktur Intelkam Polda Bali tentang pelaksanaan tugas Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Elemen Masyarakat Menciptakan Pemilu Tahun 2024 Aman Dan Damai”.
2. Melaksanakan koordinasi dengan para narasumber dan peserta sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 12 September 2023, pukul 09.00 wita melaksanakan koordinasi dengan Komisioner KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan, S.H. tentang materi “Kesiapan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Bali”
 - b. Pada tanggal 12 September 2023, pukul 11.00 wita melaksanakan koordinasi dengan Dekan FISIP UNUD Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si. tentang materi “Tantangan Pemilu, Kampanye di Kampus dan Peran masyarakat ciptakan Pemilu serentak yang aman dan damai”.
 - c. Pada
 - c. Pada tanggal 12 September 2023, pukul 12.00 wita melaksanakan koordinasi Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas) Kesbangpol Provinsi Bali Dra. I Gusti Nyoman Ramiasih, MH tentang materi “Peran Ormas dalam Pemilu 2024 guna mencegah Disintegrasi Bangsa”.
 - d. Pada tanggal 12 September 2023, pukul 13.00 wita melaksanakan koordinasi dengan Penyuluh Ahli Madya Kementrian Agama Prov. Bali I Gusti Putu Suana S. AG., M. Si., tentang materi “Mencegah politik Identitas dengan memanfaatkan tempat Ibadah”.
 - e. Kegiatan FGD dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu hari Kamis dan Jumat tanggal 14 s.d 15 September 2023 dengan jadwal kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	WAKTU	KEGIATAN	PENGAMPU	KET
KAMIS, 14 SEPTEMBER 2023				
1	08.30 – 09.00 WITA	Registrasi	Panitia	Lobby Hotel
2	09.00 – 09.20 WITA	Pembukaan	DIRINTELKAM/ WADIR	Kelas

3	09.20 – 09.30 WITA	Coffee Break	Panitia	Restoran
4	10.00 – 10.45 Wita	Materi	KOMISIONER KPU PROVINSI BALI	Kelas
5	10.45 – 11.30 Wita	Materi	PENYULUH AHLI MADYA KEMENTRIAN AGAMA PROV. BALI	Kelas
6	11.30 – 13.00 Wita	Ishoma	Panitia	Restoran
7	13.00 – 14.45 Wita	Lanjutan Materi	DEKAN FISIP UNUD	Kelas
8	14.45 – 15.30 Wita	Lanjutan Materi	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS) KESBANGPOL PROVINSI BALI	Kelas
8	15.30 – 15.45 Wita	Coffee Break	Panitia	Restoran
9	16.00 - selesai	Arahan kegiatan selanjutnya	Panitia	-
JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023				
1	07.00 – 08.30 Wita	Breakfast	Panitia	Restoran
2	08.30 – 10.00 Wita	Materi	KPU PROVINSI BALI	Kelas
3	10.00 – 10.30 Wita	Coffee Break	Panitia	Restoran
4	10.30 – 12.00 Wita	Materi	KEMENTRIAN AGAMA PROV. BALI	Kelas
5	12.00 – 13.00 Wita	Ishoma	Panitia	Restoran
6	13.00 – 13.30 Wita	Materi	DEKAN FISIP UNUD	Kelas
7	13.30 – 14.00 Wita	Materi	KESBANGPOL PROVINSI BALI	Kelas
6	14.00 – 14.15 Wita	Materi	DISKUSI SESI PERTAMA	Kelas
7	14.30 – 15.00	Coffee Break	Panitia	Restoran

	Wita			
8	15.00 – 16.30 Wita	Materi	DISKUSI SESI KE DUA	Kelas
9	16.30 – 17.30 Wita	Pembulatan	DIRINTELKAM/ WADIR	Kelas
10	17.30 – 18.00 Wita	Penutup	DIRINTELKAM/ WADIR	Kelas

IV. **PELAKSANAAN** :

- A. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 bertempat di Hotel Puri Nusa Indah Jl. Waribang no 99 Denpasar telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) hari pertama, dengan rangkaian acara sebagai berikut :

1. Pukul 07.00 s.d 08.00 wita

Seluruh peserta FGD melaksanakan registrasi dan tercatat berjumlah 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI/ ORGANISASI
1	NI LUH ADE BUNGA KRIS NANTI	BEM UNIVERSITAS NGURAH RAI
2	I KADEK ARDANA	BEM UNIVERSITAS NGURAH RAI
3	KM. GD. BAGIADA	SEK. PEMUDA BALI BERSATU
4	I KOMANG ADI SUDARTA	KMHDI BALI
5	HERMAN UMBU BILLY	FLOBAMORA BALI
6	FARID IRSYADI	FLOBAMORA BALI
7	H. YUNUS NAIM	KETUA PW. GF. ANSOR PROV. BALI
8	I MADE RASMAWAN	BALADIKA BALI
9	ELY NURWANTO	PEMUDA MUHAMMADIYAH
10	NI KOMANG DEVIANA	KMHDI BALI
11	PRADNYANANDA C. P.	YOWANA BALI
12	RUDI ARSENA	THE ONE LEGIAN
13	I GEDE DANNY M.	HRD VILLA THE LUMBUNG SEMINYAK
14	MADE ARIAWAN	THE ONE LEGIAN
15	MD. RENTIN	BPBD BALI
16	PUTU ESA PURWITA	PD KMHDI BALI

NO	NAMA	INSTANSI/ ORGANISASI
17	YUDI JANWAR P.	KERIS BALI
18	KERTAYASA	KERIS BALI
19	I PUTU EKA MAHARDIKA, S.IP.,M.AP.	PERADAH PROV. BALI
20	EKA SIVA ADNYANA	FORGIMALA PROV. BALI
21	SUELA	DINAS KESEHATAN PROV. BALI
22	I WAYAN SUKADANA	BALADIKA BALI
23	GEDE SUMARTAWAN	PEMUDA BALI BERSATU
24	I NYOMAN EDI ARIMBAWA	LASKAR BALI SHANTI
25	I KETUT ARISTIAWAN	LASKAR BALI SHANTI



2. Pukul 08.30 s/d 09.30 wita, ceremonial pemb

2. Pukul

- a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
- b. Doa.
- c. Sambutan Wadir Intelkam Polda Bali AKBP Ida Bagus Ketut Surya Dharma, S.I.K. yang intinya:

Sambutan Bapak Dir Intelkam Polda Bali yang diwakili oleh Wadir Intelkam Polda Bali intinya bahwa melalui tema kegiatan FGD yaitu “Peran Elemen Masyarakat Menciptakan Pemilu Tahun 2024 Aman dan Damai” dan dengan kehadiran narasumber yang berkompeten di bidangnya kita memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi dan berdialog sehingga diharapkan Pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman, sekaligus saya secara resmi membuka acara FGD pada hari ini.



3. Pukul 09. 30 s/d 10.00 wita, coffe break.

4. Pukul 10.00 wita, penyampaian materi:

- a. Penyampaian materi oleh Narasumber pertama, Komisioner KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan, S.H.

Moderator AKBP Gede Dartiyasa, S.Sos., M.H

Tahapan Pemilu dilaksanakan mulai tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 20 Oktober tahun 2024. Terdapat 18 Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024.

Tanggal 19 Oktober - 25 November 2023 ada Tanggal
dan Wakil Presiden sehingga suhu politik akan meningkat drastis setelah pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Massa kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2023 - 10 Februari 2024, dimana saat ini kampanye diperbolehkan di lembaga pendidikan sehingga cukup rawan karena kita tidak bisa memetakan basis pendukung di kampus atau lembaga pendidikan.

Jumlah TPS di Bali sebanyak 12.809, dimana pemungutan suara akan berlangsung dari pukul 07.00-13.00 selanjutnya akan dilaksanakan rekapitulasi suara.



- b. Penyampaian materi oleh Narasumber kedua Penyuluh Ahli Madya Kementrian Agama Prov. Bali I Gusti Putu Suana S. AG., M. Si.

Moderator AKBP Gede Dartiyasa, S.Sos., M.H

Ada baiknya tempat ibadah hanya digunakan sesuai fungsinya saja sebagai tempat beribadah karena sangat riskan terjadi politik identitas jika melaksanakan kampanye di tempat ibadah.

Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut, sehingga politik identitas perlu dihindari guna menjaga situasi yang kondusif pada saat Pemilu tahun 2024. Perlu



5. Pukul 12.00 wita peserta melaksanakan isoma

6. Pukul 13.00 wita lanjutan materi :

- a. Penyampaian materi oleh Narasumber ketiga Penyuluh Dekan FISIP UNUD Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si.

Moderator AKBP Gede Dartiyasa, S.Sos., M.H

Terdapat lima tantangan dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yaitu masalah teknis persiapan Pemilu, partisipasi pemilih, transparansi, tata kelola yang akuntabel dan masa kampanye.

Pasal 280 ayat 1 huruf (h) menyatakan bahwa tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta Pemilu hadir tanpa atribut kampanye atas undangan dari pihak penanggungjawab tempat pendidikan.

Putusan MK No. 65/PUU/XXI/2023 memperbolehkan lembaga pendidikan dijadikan salah satu tempat untuk berkampanye dengan syarat harus berdasarkan undangan dan tidak membawa atribut dan alat peraga kampanye.

Dalam

Dalam Pemilu 2024 masyarakat diharapkan ikut berperan aktif menciptakan Pemilu yang aman dan damai dengan melakukan pengawasan pemilu sesuai dengan strukturnya.



- b. Penyampaian materi oleh Narasumber keempat Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas) Kesbangpol Provinsi Bali Dra. I Gusti Nyoman Ramiasih, MH.

Moderator AKBP Gede Dartiyasa, S.Sos., M.H

Semua kegiatan Organisasi Masyarakat diatur dalam UU No 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UU.

Ormas tidak hanya menjadi penghubung & pengimbang kekuatan rakyat dengan Negara/Pemerintah, tetapi juga memberikan upaya kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam berbagai hal. Dalam konteks kehidupan sosial politik, ormas yang ada di Indonesia turut andil dalam menjadi stabilitas ketertiban- keamanan, mencegah radikalisme, ekstrimisme dan terorisme serta diharapkan ke depannya akan tetap memainkan peran tsb sehingga radikalisme bangsa & NKRI khususnya pada saat Pemilu tahun 2024.



7. Pukul 15.45 wita peserta melaksanakan Coffee break setelah itu adanya arahan panitia terkait dengan kegiatan besok/selanjutnya.

- B. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 bertempat di Hotel Grand Santhi Denpasar telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) hari kedua, dengan rangkaian acara sebagai berikut :

1. Pukul 07.00 s.d 08.00 wita

Seluruh peserta FGD melaksanakan registrasi dan tercatat berjumlah 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI/ ORGANISASI
1	NI LUH ADE BUNGA KRIS NANTI	BEM UNIVERSITAS NGURAH RAI
2	I KADEK ARDANA	BEM UNIVERSITAS NGURAH RAI
3	KM. GD. BAGIADA	SEK. PEMUDA BALI BERSATU
4	I KOMANG ADI SUDARTA	KMHDI BALI
5	HERMAN UMBU BILLY	FLOBAMORA BALI
6	FARID IRSYADI	FLOBAMORA BALI
7	H. YUNUS NAIM	KETUA PW. GF. ANSOR PROV. BALI
8	I MADE RASMAWAN	BALADIKA BALI
9	ELY NURWANTO	PEMUDA MUHAMMADIYAH
10	NI KOMANG DEVIANA	KMHDI BALI
11	PRADNYANANDA C. P.	YOWANA BALI
12	RUDI ARSENA	THE ONE LEGIAN
13	I GEDE DANNY M.	HRD VILLA THE LUMBUNG SEMINYAK
14	MADE ARIAWAN	THE ONE LEGIAN
15	MD. RENTIN	BPBD BALI
16	PUTU ESA PURWITA	PD KMHDI BALI
17	YUDI JANWAR P.	KERIS BALI
18	KERTAYASA	KERIS BALI
19	I PUTU EKA	PERADAH PROV. BALI

NO	NAMA	INSTANSI/ ORGANISASI
	MAHARDIKA, S.IP.,M.AP.	
20	EKA SIVA ADNYANA	FORGIMALA PROV. BALI
21	SUELA	DINAS KESEHATAN PROV. BALI
22	I WAYAN SUKADANA	BALADIKA BALI
23	GEDE SUMARTAWAN	PEMUDA BALI BERSATU
24	I NYOMAN EDI ARIMBAWA	LASKAR BALI SHANTI
25	I KETUT ARISTIAWAN	LASKAR BALI SHANTI

2. Pukul 08.30 s/d 14.00 wita Penyampaian materi pada hari kedua FGD:

- a. Narasumber pertama, Komisioner KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan, S.H.

Moderator AKBP Gede Dartiyasa, S.Sos., M.H

Daftar Calon Sementara (DCS) untuk DPRD Provinsi Bali yaitu 795 bacalon yang telah melakukan pendaftaran awal, 648 Bacalon yang mengajukan perbaikan, 646 Bacalon yang telah mengajukan perubahan rancangan, serta terdapat sebanyak 560 bacalon yang telah lolos verifikasi administrasi.

Jumlah

Jumlah pemilih tetap di Provinsi Bali pada pemilu tahun 2024 sbb:

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
Denpasar	495.896
Badung	403.326
Tabanan	372.372
Jembrana	243.797
Buleleng	611.901
Bangli	195.854
Karangasem	388.854
Klungkung	167.052
Gianyar	390.424

Di Provinsi Bali terdapat sebanyak 1.776.074 orang pemilih yang berusia lebih dari 40 tahun, 561.922 orang pemilih yang berusia 31 s.d. 40 tahun, 931.505 pemilih yang berusia 17 s.d. 30 tahun dan 15 pemilih yang berusia di bawah 17 tahun.



- b. Narasumber kedua, Penyuluh Ahli Madya Kementrian Agama Prov. Bali I Gusti Putu Suana S. AG., M. Si.

Moderator AKBP Gede Dartiyasa, S.Sos., M.H

Pasal

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ada penjelasan detail tentang pengertian politik identitas. Pasal tersebut, hanya memuat aturan tentang kampanye yang dilarang menghina, menghasut, mengadu domba, dan menggunakan kekerasan. Sehingga, semakin jelas bahwa negeri ini belum memiliki penjelasan detail terkait UU Pemilu sebagai rujukan. Karena itu wajib bagi seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam memerangi adanya praktik politik identitas, supaya bisa terus memerangi adanya praktik politik identitas yang sangat berbahaya dan merusak NKRI.

Langkah antisipasi pertama yang dilakukan Bawaslu Menjalain kerja sama dengan platform media sosial dan kementerian dan lembaga negara terkait. Kedua, lanjut dia, melakukan pendekatan ke kelompok atau komunitas hingga paling bawah guna mencegah adanya kampanye yang menggunakan isu SARA dan politik identitas.

Politik identitas harus ditolak,, karena sangat berbahaya bagi harmoni dan kerukunan masyarakat Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa identitas itu penting. Sebab, setiap orang tentu memiliki identitasnya masing-masing, baik jabatan, pekerjaan, kelompok gender, maupun agama dan suku bangsa.



c. Narasumber

c. Narasumber ketiga, Dekan FISIP UNUD Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si.

Moderator AKBP Gede Dartiyasa, S.Sos., M.H

Terdapat lima tantangan dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yaitu masalah teknis persiapan Pemilu, partisipasi pemilih, transparansi, tata kelola yang akuntabel dan masa kampanye.

Pasal 280 ayat 1 huruf (h) menyatakan bahwa tempat pendidikan dapat digu akan jika peserta Pemilu hadir tanpa atribut kampanye atas undangan dari pihak penanggungjawab tempat pendidikan.

Putusan MK No. 65/PUU/XXI/2023 memperbolehkan lembaga pendidikan dijadikan salah satu tempat untuk berkampanye dengan syarat harus berdasarkan undangan dan tidak membawa atribut dan alat peraga kampanye.

Dalam Pemilu 2024 masyarakat diharapkan ikut berperan aktif menciptakan Pemilu yang aman dan damai dengan melakukan pengawasan pemilu sesuai dengan strukturnya.



- d. Narasumber
- d. Narasumber keempat, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas) Kesbangpol Provinsi Bali Dra. I Gusti Nyoman Ramiasih, MH.

Moderator AKBP Gede Dartiyasa, S.Sos., M.H

Ormas tdk hanya menjadi penghubung & pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dg negara, tetapi jg memberikan upaya kontribusi positif sbg mitra pemerintah dlm melaksanakan pembangunan & upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial politik, Ormas yang ada di Indonesia turut andil dlm menjadi stabilitas ketertiban- keamanan, mencegah radikalisme, ekstrimisme dan terorisme serta diharapkan ke depannya akan tetap memainkan peran tsb sehingga dpt menopang kesatuan bangsa & NKRI. Eksistensi & kredibilitas menjadi tantangan sendiri bagi Ormas dlm memberikan bantuan utk kesejahteraan masyarakat. Mereka

selayaknya berjalan sesuai dg karakteristik organisasi yg menjadi keunggulan mereka.

Berjiwa merah-putih yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan kelompok dan pribadi supaya persatuan dan kesatuan bangsa tetap kokoh, TERUTAMA DALAM PEMILU – PEMILUKADA 2024. Badan Kesbangpol Provinsi Bali dan Kabupaten Kota se Bali memiliki peran strategis dalam mendukung Sukses Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023



a. SESI

a. **SESI DISKUSI PERTAMA**

Moderator AKBP Gede Dartiyasa,S.Sos., M.H

Pertanyaan:

- 1) Perwakilan BPBD Provinsi Bali : Kapan kita mengarah kepada pemilihan digital ?
- 2) Perwakilan dari KMHDI Bali : Pandangan KPU Provinsi Bali terkait dengan tantangan debat BEM UI kepada 3 Capres ?

- 3) Perwakilan dari BEM Universitas Ngurah Rai : Kurang setuju dengan aturan kampanye di lembaga pendidikan karena rawan terjadinya polarisasi.

Tanggapan dari Narasumber sbb :

- 1) Tanggapan Komisioner KPU Provinsi Bali untuk menjawab pertanyaan dari Perwakilan BPBD Provinsi Bali pada intinya Tahun 2014 dan 2019 kita sudah menggunakan aplikasi SI REKAP dalam proses rekapitulasi.
- 2) Tanggapan Komisioner KPU Provinsi Bali untuk menjawab pertanyaan dari Perwakilan KMHDI Bali pada intinya menyampaikan Sesuai aturan saat ini hanya KPU yang dapat melaksanakan debat Capres karena KPU yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang.
- 3) Tanggapan Dekan FISIP UNUD Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si. untuk menjawab pertanyaan dari Perwakilan dari BEM Universitas Ngurah Rai yaitu Sangat riskan jika kampus dijadikan sebagai tempat kampanye namun kami sebagai tenaga pendidik akan tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Secara umum dapat diketahui visi misi masing-masing Papol oleh mahasiswa jika berkampanye di Kampus.

b. **SESI DISKUSI KEDUA**

Moderator AKBP Gede Dartiyasa, S.Sos., M.H

Pertanyaan:

- 1) Perwakilan pelaku pariwisata tanggapan terkait Tragedi sosial banyaknya KPPS meninggal saat Pemilu?
- 2) PW
- 2) PW Ansor Provinsi Bali : hal-hal mana saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan jika ada jemaah di salah satu tempat ibadah yang mencalonkan sebagai DPR/DPRD ?

Tanggapan dari Narasumber sbb :

- 1) Dekan FISIP UNUD Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si. Petugas KPPS harus mengatur strategi dalam proses penghitungan suara. Diperlukan persyaratan kesehatan yang jelas untuk mengatur seseorang menjadi KPPS.

- 2) Penyuluh Ahli Madya Kementrian Agama Prov. Bali I Gusti Putu Suana S. AG., M. Si. Ketika ada calon DPR/DPRD yang menjual agama untuk berkampanye sebaiknya kita sebagai pemilih harus cerdas. Jika ada caleg dari jemaah masjid sebaiknya jangan menjadi pembicara di Masjid.
- c. Pembulatan sekaligus penutupan acara Focus Group Discussion (FGD) oleh Wadir Intelkam Polda Bali AKBP Ida Bagus Ketut Surya Darma, S.I.K. yang intinya menyampaikan kesimpulan semoga singergi tetap terjaga antara kita dan elemen masyarakat yang ada di Bali guna mendukung dan mengamankan Pemilu tahun 2024 di Provinsi Bali.



VII.

VII. KESIMPULAN :

- A. Secara umum pelaksanaan FGD dengan tema “Peran Elemen Masyarakat Menciptakan Pemilu Tahun 2024 Aman Dan Damai” dapat berjalan dengan aman dan lancar, dimana para peserta sangat antusias dan mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan ini karena mendapatkan informasi dan edukasi.
- B. Sementara pada sesi diskusi/interaktif antara narasumber dengan peserta merupakan sesi yang paling menarik dan para peserta sangat pro-aktif

memberikan kritik, pertanyaan dan saran dalam rangka membangun meningkatkan sinergitas Polri dengan Organisasi masyarakat sehingga dapat menjadi salah satu mitra Polri guna mengajak masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan pada Pemilu tahun 2024.

- C. Melalui kegiatan FGD dapat diperoleh informasi tentang adanya ide-ide maupun saran dari peserta melalui kegiatan diskusi sebagai berikut :
1. Pemerintah wajib terus menerus mengedukasi masyarakat tentang tahapan-tahapan pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, sehingga diharapkan elemen masyarakat dapat ikut serta menjaga keamanan diwilayahnya masing-masing.
 2. Ormas dalam hal ini dengan senang akan membantu mensukseskan Pemilu tahun 2024 di Bali yang aman, asalkan pemerintah membuat aturan-aturan pada saat pilkada yang dapat dengan mudah dicerna dan dilaksanakan oleh masyarakat.
 3. Pengawasan terhadap organisasi masyarakat yang tidak memiliki kejelasan tujuan kegiatan-kegiatannya sehingga rawan adanya ormas radikal di Bali.

VIII. SARAN :

- A. Fungsi Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan pendekatan terhadap tokoh agama, tokoh adat dan elemen masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk ikut serta mengamankan rangkaian pemilu tahun 2024.
- B. Mendorong Kesbangpol Linmas dan Satpol PP Prov. Bali agar tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Ormas di Bali sehingga tidak disusupi oleh kelompok Radikal yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di wilayah Bali pada Pemilu tahun 2024.

IX. PENUTUP

IX. PENUTUP :

Demikian laporan penugasan tentang kegiatan FGD dengan tema “Peran Elemen Masyarakat Menciptakan Pemilu Tahun 2024 Aman Dan Damai” dibuat untuk menentukan keputusan dan kebijakan selanjutnya.

PELAKSANAAN DEKLARASI DAMAI 2024

Dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif maka dilaksanakan kegiatan bersama dengan stik holder dan berbagai lapisan masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan . dalam rangka menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi maupun kegiatan perdamaian , yang di lakukan masyarakat di masing masing daerah

Bentuk kegiatan tersebut dilakukan merupakan Deklarasi Damai, yang dilakukan di Gedung PRG Polda Bali. Sebagai berikut :

- A. Hari Jumat, 18 Agustus 2023 pukul 09.00 Wita bertempat di Gedung PRG (Perkasa Raga Garwita) Polda Bali telah berlangsung kegiatan Deklarasi Damai Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam rangka Mewujudkan Situasi Kamtibmas yang Kondusif.
- B. Hadir dalam kegiatan :
 - 1. Kapolda Bali;
 - 2. Gubernur Bali diwakili oleh Wakil Gubernur Bali;
 - 3. Ketua DPRD Provinsi Bali diwakili oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali;
 - 4. Pangdam IX/Udayana diwakili oleh Kasdam IX/Udayana;
 - 5. Kabinda Bali;
 - 6. PJU Polda Bali;
 - 7. Kajati Bali diwakili oleh Asintel Kajati Bali;
 - 8. Ketua KPU Provinsi Bali;
 - 9. Ketua Bawaslu Provinsi Bali;
 - 10. Ketua FKUB Provinsi Bali;
 - 11. Ketua MDA Provinsi Bali;
 - 12. Bakal Calon DPD RI Dapil Bali atau yang mewakili;
 - 13. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Bali;
 - 14. Perwakilan dari Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan Provinsi Bali.
- C. Susunan Acara :
 - 1. Pembukaan (Prolog)
 - 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
 - 3. Pembacaan Doa

4. Sambutan dari Kapolda Bali pada intinya :
 - a. Ucapan selamat datang di Kepolisian Daerah Bali bagi seluruh peserta yang hadir pada kegiatan Deklarasi Damai Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam rangka Mewujudkan Situasi Kamtibmas yang Kondusif pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
 - b. Menjelang . . .
 - b. Menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang, suhu politik di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai meningkat mengingat waktu pemilihan sudah semakin dekat. Peserta Pemilu khususnya Partai Politik yang semakin gencar mencari dukungan di masyarakat hal tersebut memunculkan beberapa permasalahan seperti munculnya berita Hoax/berita yang menyerah pihak tertentu, SARA, maupun Politik Indentitas yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Dalam rangka menjaga situasi menjelang Pemilu tahun 2024, diperlukan upaya kolaborasi yang komprehensif dari seluruh stakeholder terkait dalam mengamankan Pemilu tahun 2024. Polda Bali telah melaksanakan berbagai upaya pre-emptif serta preventif seperti mapping Tokoh Politik, Pemetaan Daerah Rawan serta patroli sambang untuk mengantisipasi suhu politik yang semakin meningkat.
 - d. Sampai saat ini, situasi Kamtibmas di wilayah Hukum Polda Bali dalam keadaan aman dan kondusif. Diharapkan kepada seluruh unsur terkait menyamakan persepsi dan berkomitmen dalam mencegah adanya polarisasi ekstrem di masyarakat dengan cara mendorong kedewasaan masyarakat dalam mengelola informasi khususnya di Media sosial.
 - e. Kepada seluruh stakeholder terkait diharapkan dukungan kepada Polda Bali dalam rangka mensukseskan Pemilu tahun 2024 serta Polda Bali siap menerima masukan dan saran dari semua kalangan menjelang dan pasca Pemilu tahun 2024.
5. Sambutan dari Ketua KPU Provinsi Bali pada intinya :
 - a. Apresiasi kepada Polda Bali yang sudah menyelenggarakan kegiatan Deklarasi Damai Peserta Pemilu tahun 2024 yang sangat bermanfaat dalam rangka menciptakan Pemilu yang Damai dan Berintegritas.

- b. KPU Provinsi Bali telah membuat deadline Pemilu 2024 sebagai sarana integritas bangsa. KPU bertanggungjawab untuk menciptakan Pemilu yang Jujur dan Adil serta mengawal pelaksanaan Pemilu untuk mengemban kepercayaan dari masyarakat khususnya masyarakat Bali.
- c. Berdasarkan PKPU tentang Kampanye, KPU menghimbau kepada seluruh Partai Politik bahwa pada masa sekarang belum memasuki masa Kampanye diharapkan Partai Politik hanya melaksanakan sosialisasi dan hanya memasang bendera Partai bukan pemasangan baliho yang mengandung unsur ajakan maupun kampanye dini.
- d. KPU memiliki target partisipasi pemilih sebesar 80 persen serta Zero Sengketa, maka dari itu diharapkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu agar terwujudnya Pemilu Damai dan Berintegritas.

6. Sambutan . . .

- 6. Sambutan dari Wakil Gubernur Bali pada intinya :
 - a. Apresiasi terhadap kegiatan DEKLARASI DAMAI PESERTA PEMILU 2024 yang difasilitasi oleh Kepolisian Daerah Bali. Kesempatan ini bisa digunakan oleh peserta Pemilu 2024 untuk mendeklarasikan pemilu berintegritas dan damai, yang dituangkan dalam deklarasi damai serta ditandatangani oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
 - b. Dengan komitmen dan konsistensi dari peserta pemilu akan muncul keharusan untuk turut bersama-sama menciptakan iklim kondusif bagi Pemilu 2024.
 - c. Dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 ada empat kunci sukses yang menjadi faktor utama yaitu: Pertama, faktor penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU dan BAWASLU yang sangat penting untuk selalu menjaga integritas yang adil, obyektif dan profesional. Kedua, faktor peserta pemilu, dalam hal ini adalah peserta pemilu yang terdiri dari partai politik bersama para calon legislatif. Yang mana peserta pemilu dituntut memiliki integritas, patuh dan taat terhadap regulasi yang ada serta tidak memantik politik sara. Ketiga adalah faktor masyarakat atau pemilih yang juga harus memiliki integritas, karena seorang pemilih memiliki hak konstitusional yang digunakan dengan penuh tanggung jawab.

Keempat adalah faktor stakeholder seperti Kepolisian, TNI dan ASN yang harus menjaga netralitasnya.

7. Pembacaan dan Penandatanganan Deklarasi Damai Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh masing-masing Partai Politik

8. Foto Bersama

9. Penutupan dan Ramah Tamah

D. Kegiatan berakhir pukul 10.30 Wita dengan berjalan aman dan lancar.

II. **CATATAN :**

A. ANALISA

Kegiatan Deklarasi Damai Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam rangka Mewujudkan Situasi Kamtibmas yang Kondusif bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Penyelenggara Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 serta Instansi terkait guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

B. PREDIKSI

Menjelang masa Kampanye Pemilu tahun 2023 suhu politik mulai kian meningkat serta tidak menutup kemungkinan timbulnya gesekan antar kader/simpatikan dari Partai Politik pada masa Kampanye yang berdampak kepada stabilitas Kamtibmas pada Pemilu tahun 2024.

C. LANGKAH . . .

C. LANGKAH - LANGKAH INTELIJEN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Monitoring kegiatan Deklarasi Damai Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam rangka Mewujudkan Situasi Kamtibmas yang Kondusif yang bertempat di Gedung PRG (Perkasa Raga Garwita) Polda Bali.
2. Melaksanakan pengamanan tertutup terhadap kegiatan serta membuat laporan.

D. REKOMENDASI

Kiranya tetap dilakukan monitoring setiap kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu maupun Instansi terkait menjelang pelaksanaan pemilu 2024 guna dapat mengantisipasi kerawanan yang mungkin dapat ditimbulkan.

Antisipasi konflik :

Antisipasi konflik dapat dilakukan melalui Media maupun masyarakat umum, dengan mengikut sertakan kelompok - kelompok ormas yang terkait . untuk melakukan kontrol ataupun monitoring perkembangan kegiatan masyarakat , sekecil apa pun sehingga semua berperan sebagai mata dan telinga, sekecil apapun kejadian konflik di masyarakat dapat segera di antisipasi bersama dengan seluruh masyarakat dan aparat pemerintahan yang terlibat

Adapun bentuk sosialisasi peran kerjasama polri dewan pers dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers termuat sebagai berikut :

Kerjasama perlindungan masyarakat dan personel media , dengan memberi pemahaman menyeluruh dan masif . sebagai tindak lanjut MOU kesekapahaman pers dan kepolisian negara republik indonesia .perlindungan , kemerdekaan pers dan penegak hukum, dan kesepakatan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan

I. FAKTA - FAKTA :

1. Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 09.30 Wita bertempat di Hotel Tuntrum Kuta Bali Jalan Pantai Kuta No. 1 Pande Mas, Kuta, Badung telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peran Kerjasama Dewan Pers-Polri Dalam Rangka Perlindungan Kemerdekaan Pers.

2. Maksud dan tujuan kegiatan : memberikan pemahaman secara menyeluruh dan masif kepada stakeholder/peserta sebagai tindak lanjut MOU / Kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor: 03/DP/MOU/III/2022, Nomor: NK/4/2022 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakkan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

3. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut berjumlah 43 orang, terdiri dari sbb :

- a. PJU Polda Bali, atau yang mewakili.
- b. Kasat Reskrim jajaran Polda Bali, atau yang mewakili.
- c. Ketua AJI Bali,
- d. Ketua AMSI Bali,
- e. Ketua ATVLI Bali,
- f. Ketua ATVSI Bali,
- g. Ketua IJTI Bali,
- h. Ketua JMSI Bali,
- i Ketua PFI Bali,
- j. Ketua PRSSNI Bali,
- k. Ketua PWI Bali,
- l. Ketua SMSI Bali,
- m. Ketua SPS Bali,
- n. 5 orang Ahli Pers.

4. Narasumber dalam kegiatan tersebut :

- a. KBP. Arief Prapto Santoso, S.I.K., S.H., M.H. Irwasda Polda Bali.
- b. IJP Adi Deriyan Jayamartha, S.IK, M.H, Jabatan Staf Ahli Kapolri Bidang Management.
- c. BJP Iwan Kurniawan, Karo Wassidik Bareskrim Polri.
- d. Arif Zulkifli, Ketua Komisi Hukum dan perundang-undangan.
- e. Asep Setiawan, Wakil Ketua Komisi Hukum dan perundang undangan.
- f. Yadi Hendriana, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers.

Moderator dalam kegiatan Hendrayana, Tenaga Ahli Hukum dan Perundang undangan.

Sekretariat Dewan Pers:

- a. Adi Pramudita
- b. Saidah Laila
- c. Astrid Juniar Hia
- d. Hasannudin

5. Adapun susunan acara sebagai berikut :

- a. Registrasi Peserta
- b. Pembukaan oleh MC :
 - Menyanyikan lagu Indonesia Raya
 - Sambutan dari Dewan Pers yang disampaikan oleh Bapak Arif Zukifli intinya kegiatan ini adalah yang ke 5 kalinya diselenggarakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan perjanjian kerjasama (PKS) sebagai jalinan komunikasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan maka harus

dikoordinasikan dengan Dewan Pers, apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan maka harus dikoordinasikan dengan Dewan Pers, jika hal tersebut masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers. Namun apabila masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan diluar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka Polri menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Keynote Speech dari Bapak Kapolda Bali, yang disampaikan oleh Bapak Irwasda Polda Bali yang intinya pada intinya :

Ucapan selamat datang di Pulau Bali kepada Dewan Pers. dalam rangka kegiatan Sosialisasi. Pentingnya kerjasama Pers dalam bertugas di era digitalisasi 4.0 agar mendapatkan berita terkini secara cepat dan tepat bukannya pekerjaan yang mudah bagi jurnalis terkadang sering mendapatkan tindakan kekerasan, disamping itu terkadang menuai protes masyarakat akibat pemberitaan pers yang merasa keberatan.

Dengan adanya PKS dan MoU

Intinya tidak ada kriminalisasi terhadap Pers, dan apabila ada Laporan tentang pemberitaan oleh Pers maka perlu dilakukan koordinasi dgn Dewan Pers dan Kasat Serse juga agar selalu mengontrol anak buahnya dalam pelaksanaan tugas. Apresiasi kepada Dewan Pers atas koordinasi dan Sinergitas dengan Polda Bali sehingga kedepan antara ke 2 lembaga bisa menjalin koordinasi.

- Penyerahan Plakat dari Pak Arif Zulkifli kepada Bapak Irwasda Polda Bali.

c. Diskusi Panel dari Narasumber sbb :

- Bapak Irwasda Polda Bali dengan materi Implementasi MoU dan Perjanjian Kerjasama Dewan Pers dan Polri dalam penanganan kasus pers di wilayah Polda Bali

-BJP Iwan Kurniawan, Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri yang intinya menyampaikan Implementasi Kerjasama Dewan.

- IJP. Adi Deriyan Jayamarta, S.IK, M.H, Jabatan Staf Ahli Kapolri Bidang Management, pada intinya : Pers mempunyai kebebasan mendapat berita dan disampaikan kepada masyarakat.

Perlu kerjasama terkait education dgn Polri terkait penyusunan berita dalam press release sehingga ditangkap pemberitaan positif bukan negatif. Setelah PKS (Perjanjian Kerja Sama) dibentuk tindak lanjutnya : Wajib dilaksanakan, Konsisten, Harus belajar & mengajari satuan yang ada dibawahnya.

- Dewan Pers dengan materi Peraturan dan Produk Hukum Dewan Pers : (1) Undang-undang Pers (2) Kode Etik Jurnalistik (3) Peraturan Dewan Pers dan Mekanisme Pengaduan Dewan Pers

- Tanya Jawab

- Foto Bersama.

6. Seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi berakhir pukul 11.55 wita berlangsung dalam situasi aman dan tertib.

II. ANALISA :

1. Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor: 03/DP/MOU/III/2022, Nomor: NK/4/2022 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakkan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

2. Inti dari dilaksanakan MOU ini sebagai upaya Dewan Pers untuk melindungi wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan, apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan maka harus dikoordinasikan dengan Dewan Pers, jika hal tersebut masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers. Namun apabila masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan diluar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka Polri menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

III. PREDIKSI :

MOU / Kesepahaman tsb harus sampai ke anggota tingkat paling bawah karena tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa sesuai MOU tidak dipahami di tingkat jajaran sampai bawah.

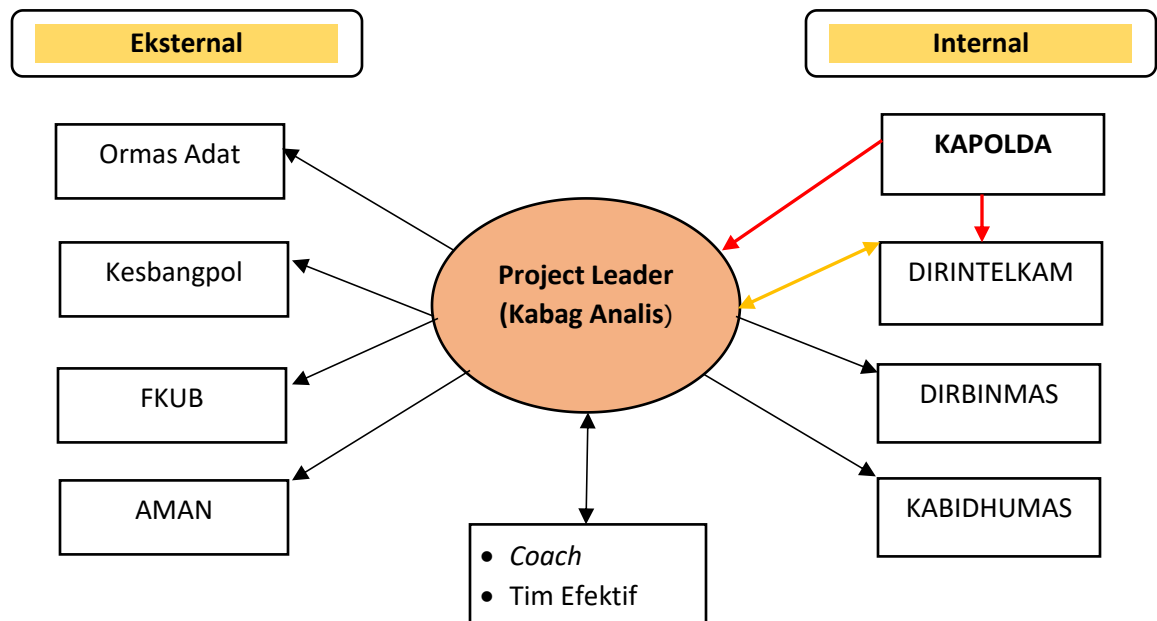
IV. LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN :

Monitor pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan

V. REKOMENDASI :

Perlu kiranya kolaborasi antara Polri dan Dewan Pers dalam rangka proses penegakan hukum terkait permasalahan hukum sehubungan pemberitaan atau tindakan yang dilakukan para pelaku profesi jurnalistik dan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk profesionalisme Polri dalam rangka penegakan hukum di masyarakat sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg berlaku.

B. NET MAP STAKEHOLDERS (Peta Koordinasi)



Keterangan:

- ↔ = Diskusi
- = Instuksi/ Perintah
- = Instruksi/Petunjuk/konsultasi
- = Penerima manfaat (Sosialisasi)

C. Stakeholders

1. Stakeholders Internal

KAPOLDA, DIRINTELKAM, DIRBINMAS, BIDHUMAS.

2. Stakeholders Eksternal

Kesbangpol, FKUB, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nasional) serta Ormas Adat seperti: DAD, Batamat, Gerdayak, Fordayak, Kerukunan Jawa/ Batak/ Sulawesi/ Sunda dll.

VIII. TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

No	Pertemuan FGD	Penandatanganan MOU	Deklarasi	Pertemuan Forum Silaturahmi
1.	Sprint Panitia	Hasil FGD sebagai tindak lanjut Draft persiapan naskah MOU	Sprint Panitia	Sprint Panitia
2.	Rapat Persiapan	Rapat persiapan Finalisasi Naskah MOU	Rapat Panitia Persiapan Pertemuan Deklarasi	Rapat Panitia Persiapan Pertemuan Forum Silaturahmi
3.	Persiapan administrasi Kegiatan: - Kerangka Acuan Kegiatan - Jumlah peserta - Narasumber - Undangan - Dll	Pelaksanaan Penandatanganan MOU	Persiapan administrasi Kegiatan: - Kerangka Acuan Kegiatan - Jumlah peserta - Undangan - Dll	Persiapan administrasi Kegiatan: - Kerangka Acuan Kegiatan - Jumlah peserta - Narasumber - Undangan - Dll
4.	Pelaksanaan Kegiatan: - Pengantar (maksud dan tujuan Kegiatan) - Sambutan - Pelaksanaan FGD - Kesimpulan FGD - Notulensi		Pelaksanaan Kegiatan: - Pengantar (maksud dan tujuan Kegiatan) - Sambutan - Pembacaan (bersama) Deklarasi	Pelaksanaan Kegiatan: - Pengantar (maksud dan tujuan Kegiatan) - Sambutan - Sharing Informasi - Peresmian kantor Sekretariat - Dokumentasi
<i>Evidence Product.</i>	- Kesimpulan FGD - Dokumentasi - Laporan Kegiatan	- Naskah MoU - Dokumentasi - Laporan Kegiatan	- Dokumentasi - Laporan Kegiatan	- Dokumentasi - Laporan Kegiatan

IX. TIME TABLE IMPLEMENTASI KEGIATAN JANGKA PENDEK (60 HARI)

No.	Nama Kegiatan	September 2021				Oktober 2021			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	FGD			√					
2.	MOU			√					
3.	Deklarasi					√			
4.	Pembentukan Forum Silaturahmi							√	√
5.	Sekretariat Forum Bersama							√	√

X. RENCANA STRATEGIS MARKETING

<i>PRODUCT</i>	<i>PLACE</i>	<i>PRICE</i>	<i>PROMOTION</i>	<i>COSTUMER</i>
- Ada MOU - Ada Deklarasi Bersama - Ada Sekretariat Bersama Forum	- POLDA - POLSEK - POLRES - KESBANGPOL	- Dukungan Pemda - Inisiatif Ormas Adat - Donatur	- STR Kapolda Bali ke Kolres jajaran Kabupaten/Kota - Kerjasama dengan Media Informasi (Media cetak, dan elektronik dll) - Leaflet, spanduk	- Pengurus Ormas Adat - Pengurus AMAN - Kesbangpol - FKUB - Kelompok Masyarakat adat lainnya.

XI. RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

<i>TARGET</i>	<i>KOMPETENSI</i>	<i>STRATEGI</i>
Ormas Adat	Kerjasama antar Ormas	MoU, Sosialisasi
Kesbangpol	Kerjasama antar Ormas	MoU, Sosialisasi
FKUB	Kerjasama antar Ormas	MoU, Sosialisasi
AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)	Kerjasama antar Ormas	MoU, Sosialisasi

TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN INTELEGENT DALAM RANGKA MENGANTISIPASI SUMBER KONFLIK YANG TERJADI DI MASYARAKAT

1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan dua sisi kehidupan ekonomi yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu banyak orang sering menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah sama. Namun demikian pada dasarnya dalam ilmu ekonomi hal itu dapat dibedakan. Setiap daerah dalam wilayah Negara tertentu sangat berkepentingan terhadap tumbuhnya perekonomian di daerahnya. Berbagai upaya akan dilakukan dan diusahakan agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara terus menerus atau berkesinambungan sehingga dapat memperlancar pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa konsep pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih merupakan focus utama dan pembangunan ekonomi suatu Negara, meskipun akhir-akhir ini kerap terjadi perdebatan antara pertumbuhan dan

pemerataan atau distribusi pendapatan Banyak kalangan beranggapan bahwa pengukuran pembangunan ekonomi dengan melihat angka-angka pertumbuhan ekonomi dan tingkat income perkapita

masyarakat dari tahun ke tahun tidak menggambarkan pembangunan ekonomi secara riil, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sertai dengan tingginya income perkapita masyarakat tanpa diikuti distribusi pendapatan yang lebih merata hanya akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi yang luar biasa antara golongan pendapatan tinggi dengan golongan berpendapatan rendah.

1. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul di dasarkan atas perkembangan ekonomi Masyarakat yang tidak merata dan pekerjaan yang semakin kompleks, dan yang mengakibatkanberagam upaya masyarakat meningkatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, dengan berbagai cara untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi ekonominya agaknya semua sepakat bahwa laju pembangunan ekonomi suatu Negara atau suatu daerah tertentu harus terus di upayakan tanpa mempertentangkan yang mana harus dilakukan antara pengejaran pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi, akan tetapi lumbung minyak di tanah air ini banyak dikelola oleh perusahaan asing. Pertamina sebagai jargon BUMN dalam pengelolaan minyak bumi hanya sebagai pajangan dan Pemerintah lebih bernaftu memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan asing. Kondisi ini jelas berseberangan dengan konsep welfarestate (negara kesejahteraan). Proses Pembangunan ekonomi di segala bidang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Proses perubahan struktural perekonomian seperti perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan merupakan sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejarah ekonomi Indonesia adalah kisah pertarungan gagasan atas dua pokok soal penting: kepantasan subsidi dan nasib kemakmuran ekonomi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), diamana bahan bakar minyak ini sangat penting dan berpengaruh kestabilan perekonomian

di masyarakat.

ANALISIS MASALAH DAN AKAR PERMASALAHAN

3. Analisis Masalah

Dampak secara sederhana dapat diartikan pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif dampak juga bisa merupakan, proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Adapun indikator dalam akar permasalahan dalam penguatan integritas Kepala Daerah pencegahan kasus korupsi yakni sebagai berikut :

1) Kebutuhan pokok

Di antara bahan pokok yang harus di stabilkan oleh pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan hal layak / masyarakat yang tidak kalah pentingnya adalah BBM. Untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pemasaran. BBM sampai ke masyarakat dengan tepat waktu dan jumlah penyaluran ke masing masing agent atau depo, maka ditunjuk Pertamina sebagai BUMN Resmi yang menyalurkan, di masing masing daerah. Dalam hal ini fungsi dan tugas badan kepolisian sebagai pengawas ekonomi, mendatakan secara rinci agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan BBM dan distribusinya pada setiap daerah. Contoh tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kepolisian, melakukan pengawasan dan distribusi seperti di bawah ini Data tersebut merupakan bentuk kegiatan pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan yang berakibat merugikan negara atau korupsi Beberapa foto di bawah ini, merupakan bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepolisian daerah Polda Bali bersama dengan instansi terkait, dipertamina dan penyalur BBM

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENGATASI MASALAH

Upaya seorang pemimpin dalam mengatasi masalah Penelitian ini penulis terfokus pada dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap Sembilan bahan pokok (SEMPAKO) yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan pada bulan Maret dan April

2015 yang berlokasi di Pasar Tradisional di kota Denpasar dan sekitarnya, di delapan kabupaten se Bali. Peran serta pejabat daerah dan kepolisian daerah Bali, dalam menantisipasi dan mencegah penyelewengan sembako di atas adalah merupakan tanggung jawab bersama. Secara bersinambungan dan tepat sasaran sehingga masyarakat kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik dan merata. Baik secara langsung maupun tidak langsung, perubahan harga BBM memiliki dampak terhadap harga akhir sebuah produk baik itu berupa barang ataupun

jasa, diperlukan bahan bakar untuk memperoleh bahan baku, memproduksi dan mendistribusikannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Dalam melakukan pengawasan dan mencegah tindakan penyelewengan yang berakibat sumber konflik yang terjadi di daerah maka, kepala pemerintahan atau pejabat instansi terkait yang berada di daerah. harus dapat berkerjasama, bersinergi melakukan pengawasan dan pengaturan secara benar terhadap roda ekonomi daerah. Dan harus mampu melakukan inovasi serta perubahan menuju ekonomi masyarakat yang bersih. Saran: untuk melakukan dan menjalankan kepemimpinan agar tercapainya masyarakat yang bersih dan pemerataan ekonomi yang madani maka, setiap stakeholder mampu mengerahkan mengarahkan bawahannya. Supaya berkerjasama kreatif, inovatif, mandiri, bersih, jujur dan tidak melakukan korupsi dan atau menyelewengkan tugas yang diperintahkan oleh negara. Sehingga apa yang diharapkan oleh negara adalah tidak korupsi dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Maka akan tercipta masyarakat adil dan Makmur.



- b. Kegiatan simakrama yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Bali dengan Pasikian yowana.

Maksud dan tujuan kegiatan dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas yang aman dan kondusif pada pawai ogoh-ogoh menjelang perayaan hari raya nyepi saka 1945/2023.

- Melakukan pasikian atau parum bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait pawai ogoh-ogoh atau kegiatan upacara keagamaan lainnya.
- Menciptakan situasi yang aman dan nyaman guna menentukan wisata yang datang ke bali, dan setiap warga bali Bersama untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif di Masyarakat.
- Arahan dan petajuh bendesa agung dan para tokoh bali di bidang agama tradisi dan kearifan local serta seni budaya menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan umat beragama di bali sangatlah kental dan berjalan dengan baik.
- Selain kegiatan lidik, pam, gal di lapangan, juga untuk mendukung dan melengkapi system giat laporan yang diterima maka dibuatkan aplikasi yang dikenal dengan aplikasi SIDASI Aplikasi SIDASI BIK adalah sebuah aplikasi yang ditunjukan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi untuk digunakan bagi kepentingan taktis yaitu menentukan tindakan - tindakan yang akan diambil dengan memperhitungkan resiko dan pemberdayaan sarana-sarana yang ada secara efektif dan efisien dalam batas waktu tertentu. Manfaat aplikasi SIDASI yaitu:
 - Menggunakan ti dalam susun produk intel dan dokumen/filling (KDU) secara tersistem sebagai data base
 - Akses oleh pejabat intelkam dari tingkat baintelkam , Dit Ik Polda, Kasat Ik Polres dan kasatwil sehingga dukung kecepatan dalam proses pencarian data
 - Dapat menginput data dimanapun dan kapanpun serta dengan perangkat yang dimiliki oleh pers imtelkam
 - Input laporan informasi dan informasi khusus oleh personil intelkam dapat dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja personel dengan keluaran produk intel
 - Keamanan data akan tersimpan dengan baik (system didukung oleh enkripsi)
 - Data yang sudah masuk sebagai pelengkap data dalam pembuatan analisa pembuatan produk intel
- Program SIPANDU BERADAT propinsi bali sangat diapresiasi oleh Kapolri sehingga YOWANA bersinergi dengan SIPANDU BERADAT untuk menjaga keamanan dan

ketertiban didesa adat masing masing dalam setiap upacara keagamaan maupun pelaksanaan perayaan agama hindu dan agama yang lain.

- Upaya lain dilaksanakan pengaman dan penggalangan juga dalam bentuk pembinaan dalam membangun kemitraan dengan peranata adat dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat . kegiatan tersebut dilakukan di masyarakat desa adat dan kabupaten di bali , adapun kegiatan tersebut berupa seperti pada gambar :



Peserta
PKN II Angkatan XXVIII/2023

Drs. I Nyoman Gede Suarianta
NDH: 057